

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 589583 Faxsimile (0274) 586712
Website: www.bappeda.jogjaprovo.go.id e-mail : bappeda@jogjaprovo.go.id KodePos 55213

Yogyakarta, 26 Juli 2022

Nomor : 054/ 05913
Sifat : Biasa
Lampiran : Bendel
Perihal : Permohonan Narasumber

Kepada
Yth. **Dr. Nur Widiastuti., SE., M.Si**
di_
Yogyakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) *Sustainable Development Goals* (SDG's) / Tujuan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2023 – 2027, Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta bermaksud menyelenggarakan rapat koordinasi dengan tema “Bimbingan Teknis RAD SDG's di DIY Tahun 2023 - 2027” yang akan kami laksanakan pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 4 Agustus 2022
Jam : 08.00 WIB - selesai
Tempat : Grand Inna Malioboro Hotel
Jl. Malioboro No.60, Suryatmajan, Kec.
Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah
Istimewa Yogyakarta

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, kami mohon kesediaanya untuk menjadi narasumber dalam acara tersebut, dengan penyajian paparan tentang “**Pembangunan Daerah DIY yang Berkelanjutan untuk Mendukung Pencapaian SDG's**”. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bpk. Aris Widiyanto, S.Sos. (081228892124). Paparan dapat dikirimkan melalui email: sosbudbappedadiy@gmail.com.

Atas perhatian dan kesediaanya, kami ucapkan terimakasih.



KEPALA,

Drs. BENY SUHARSONO, M.Si
NIP. 19650512 198602 1 002

Lampiran I

Nomor : 054 / 05912

Tanggal : 26 Juli 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
BIMBINGAN TEKNIS / ASISTENSI RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
(RAD TPB/*SDGs*) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

TPB/SDGs sendiri adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pemda DIY berkomitmen untuk mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menetapkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 yang kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 86 tahun 2019 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022.

RAD TPB DIY Tahun 2018-2022 disusun dengan pelibatan segenap segenap OPD Pemerintah Daerah DIY, Instansi Vertikal dan perwakilan dari beberapa lembaga non pemerintah serta akademisi, yang kemudian juga terlibat aktif dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasinya. Pelibatan berbagai *stakeholder* dalam penyusunan RAD TPB DIY 2018-2022 bertujuan agar pelaksanaan SDGs di DIY menjadi selaras dan kolaboratif antar semua unsur, dan selanjutnya dengan akuntabilitas yang baik akan memacu kualitas pelaksanaan yang efektif dan efisien. Keselarasan ditunjukkan dalam tujuan yang ada dalam TPB yang secara implisit juga merupakan isu pembangunan di DIY, hal ini dijabarkan sebagai berikut :

	Isu Pembangunan Berkelanjutan DIY	Tujuan TPB
	Pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan risiko bencana	1. Air bersih dan sanitasi layak (tujuan 6) 2. Kota dan permukiman berkelanjutan (tujuan 11) 3. Penanganan perubahan iklim (tujuan 13) 4. Ekosistem Lautan (tujuan 14) 5. Ekosistem Daratan (tujuan 15)
	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan tingginya alih fungsi lahan pertanian	1. Tanpa Kelaparan (tujuan 2) 2. Kota dan Permukiman berkelanjutan (tujuan 11)
	Masih tingginya ketimpangan wilayah	1. Pekerjaan Layak dan pertumbuhan ekonomi (tujuan 8) 2. Berkurangnya Kesenjangan (tujuan 10)
	Penyediaan infrastruktur di kawasan pesisir selatan belum optimal	Industri, Inovasi dan Infrastruktur (tujuan 9)
	Angka kemiskinan masih tinggi	1. Tanpa Kemiskinan (tujuan 1) 2. Berkurangnya Kesenjangan (tujuan 10)
	Belum optimalnya implementasi Pendidikan Karakter dan Pendidikan Vokasi dalam rangka meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia	Pendidikan Berkualitas (Tujuan 4)
	Belum optimalnya pelestarian Budaya Baik Benda Maupun Tak Benda dalam mengantisipasi dinamika perubahan.	Kota dan Permukiman Berkelanjutan (Tujuan 11)
	Belum optimalnya implementasi Tata Kelola pemerintahan (Good Governance) pada semua lini pemerintahan	Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang Tangguh (Tujuan 16)
	Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Inklusif	1. Energi bersih dan terjangkau (Tujuan 7) 2. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan ekonomi (Tujuan 8) 3. Industri, Inovasi dan Infratraktur (Tujuan 9) 4. Berkurangnya Kesenjangan (Tujuan 10)
	Belum optimalnya ratifikasi Kebijakan Internasional Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB	Kemitraan untuk mencapai tujuan (Tujuan 17)

Hasil evaluasi pelaksanaan SDGs DIY menunjukkan beberapa catatan terhadap kondisi pembangunan di DIY diantaranya : permasalahan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, permasalahan hak politik warga, dan permasalahan lingkungan seperti seperti audit energi pada bangunan, pengelolaan sampah regional, luas tutupan lahan dan vegetasi, kawasan hutan tertata dan penanganan kawasan kumuh. Apabila dilihat dari capaian indikatornya, beberapa indikator TPB yang masih perlu perhatian di DIY diantaranya (1) Tingkat kemiskinan daerah (tujuan 1); (2) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (tujuan 10); (3) Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan layanan jaminan Kesehatan (tujuan 1); (4) Bangunan/Gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi (tujuan 7); (5) Jumlah perusahaan yang sudah menerapkan norma K3 (tujuan 8); (6) Koefisien gini (tujuan 10); (7) Jumlah peserta proper yang mencapai minimal ranking biru (tujuan 12); (8) Peningkatan pengelolaan sampah regional (tujuan 15); (9) Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (tujuan 15); (10) Persentase Kawasan hutan tertata (tujuan 15); (11) Indeks hak-hak politik (tujuan 16), dan (12) Penanganan Kawasan kumuh (tujuan 16).

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RAD TPB DIY 2018-2022 sehingga sesuai dengan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemda DIY akan menyusun RAD TPB untuk periode 2023-2027. Dalam penyusunan RAD tersebut diperlukan penguatan komitmen dari seluruh *stakeholder* terkait dan pemahaman yang komprehensif baik dari aspek sunstantif maupun aspek teknis penyusunannya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah :

1. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas baik substansi maupun teknis bagi aparatur di lingkup Pemda DIY maupun *stakeholder* terkait dalam penyusunan RAD TPB DIY 2023-2027
2. Mensinkronkan target dan program/kegiatan di tingkat global, pusat dan daerah dalam penyusunan RAD TPB DIY 2023-2027

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Peningkatan kapasitas OPD dan *stakeholder* terkait dalam penyusunan RAD TPB DIY 2023-2027.
2. Penyusunan draft RAD TPB DIY 2023-2027 yang selaras, sinergis, dan kolaboratif antar level pemerintahan dan *stakeholder* terkait.

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Gubernur DIY Nomor 86 tahun 2019 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022;
12. Keputusan Gubernur DIY Nomor 331/TIM/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022.

D. Keluaran

Dokumen bimbingan teknis penyusunan draft RAD TPB DIY Tahun 2023 - 2027.

E. Lingkup dan Lokasi Kegiatan

Lingkup kegiatan ini adalah :

1. Evaluasi capaian program/kegiatan percepatan target TPB DIY sebagai bahan penyusunan RAD TPB DIY 2023-2027
2. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan program/dan kegiatan percepatan target TPB DIY.

F. Jadwal Pelaksanaan

Uraian	Bulan											
Penyiapan dokumen administrasi												
Rapat-rapat												
Bimtek Penyusunan RAD TPB												
Laporan Akhir												

G. Susunan Acara

Hari : Kamis

Tanggal : 4 Agustus 2022

Jam : 08.00 WIB s/d selesai

Tempat : Grand Inna Malioboro Hotel

Jl. Malioboro No.60, Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta

Susunan Acara Bimtek RAD SDG's

Waktu	Acara	Keterangan
08.00 – 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30 – 09.00	Pembukaan	MC
09.00 - 09.30	Sambutan dan Arahan dari Kepala Bappeda DIY Pemateri I : Kebijakan dan Perencanaan Berkelanjutan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta	Kepala Bappeda DIY
09.30-10.00	Pemateri II : Sosialisasi Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDG's	Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
10.30 – 11.00	Pemateri III : Pembangunan Daerah DIY yang Berkelanjutan untuk Mendukung Pencapaian SDG's	Dr. Nur Widiastuti., SE., M.Si Tenaga Ahli SDG's Bappeda DIY
11.00 – 12.00	Diskusi terarah	Moderator (Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY)
12.00 WIB	Penutup	MC

H. Peserta

Peserta kegiatan ini adalah: OPD di lingkungan Pemda DIY, Kabupaten/Kota, Akademisi, serta unsur Non G.

I. Bentuk Kegiatan

Rapat koordinasi dilakukan dalam bentuk *hybrid* (daring dan luring) diselenggarakan dalam format diskusi terfokus. Pertemuan diawali dengan arahan dan penyampaian materi dan dilanjutkan dengan diskusi

J. Biaya

Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan biaya APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DIPA BAPPENAS Nomor 055.01.3.040069/2022, 17 November 2021



STIE WIDYA WIWAHA
LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT

SURAT TUGAS
No. 28/LP2M/ST/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Beta Asteria, SE, MM., M.Ec.Dev
NIP/NIDN : 0503128301
Jabatan Struktural : Kepala LP2M STIE Widya Wiwaha

Dengan ini memberikan tugas kepada:

Nama : Dr. Nur Widiastuti, SE, M.Si
Jabatan : Dosen STIE Widya Wiwaha

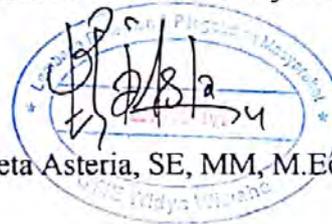
Berdasarkan surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis/ 4 Agustus 2022
Waktu : 08.00 s.d selesai
Tempat : Hotel Grand Ina Malioboro
Acara : Bimbingan Teknis RAD SDG's di DIY tahun 2023-2027

Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya

Yogyakarta, 26 Juli 2022

Ketua LPPM STIE Widya Wiwaha



Beta Asteria, SE, MM., M.Ec.Dev

PEMBANGUNAN DAERAH DIY YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN SDG'S

YOGYAKARTA, 4 AGUSTUS 2022

OLEH

TA SDGS DIY

DR. NUR WIDIASTUTI., SE., M.SI

OUTLINE

Pendahuluan



DIY dan SDGs

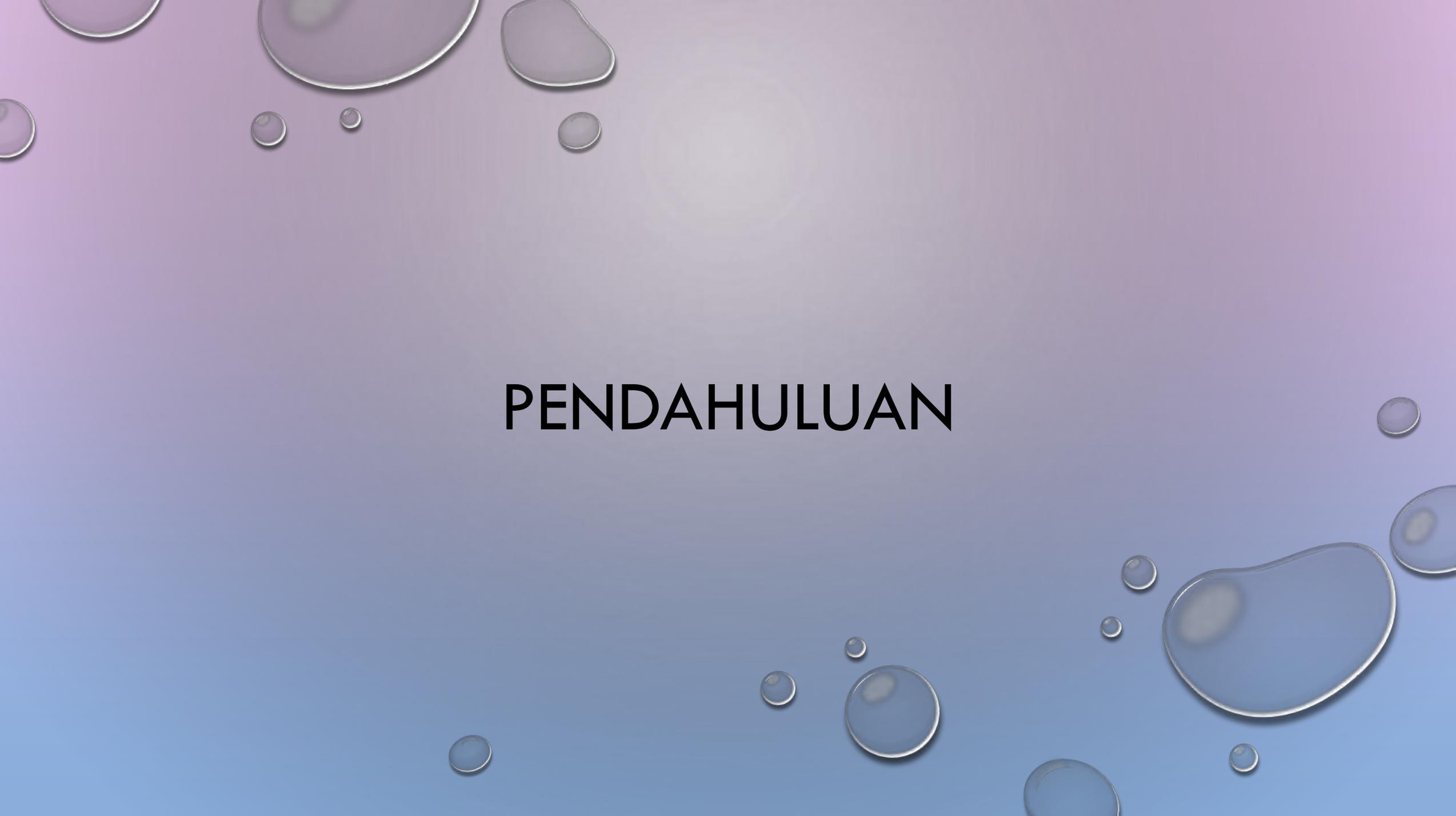


Rencana Aksi Daerah



Good Practice

PENDAHULUAN

The background features a vertical gradient from light purple at the top to light blue at the bottom. Scattered throughout are several realistic water droplets of various sizes, each with a highlight and a shadow, giving them a three-dimensional appearance.

DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENCAPAIAN SDGS



Risiko Ekonomi

- **Penurunan daya beli masyarakat**
 - Adanya *loss of income* sebesar Rp 374,4 Trilyun*
- **Peningkatan angka kemiskinan**
 - Persentase penduduk miskin meningkat sebesar 9,78 persen pada Maret 2020**
- **Peningkatan angka pengangguran**
 - 14,28% penduduk usia kerja terdampak COVID-19 dengan 2,56 juta orang mengangur**
- **Peningkatan kesenjangan**
 - Rasio Gini meningkat 0,001 menjadi 0,381 pada maret 2020**
- **Kegiatan komersial menurun**
 - Transportasi dan Pergudangan menurun pada Q2 -16,70% (yoy)**
 - Penyediaan akomodasi makan dan minum Q2 -11,86% (yoy)**

*Bappenas dan LPEM UI, 2020

**BPS 2020



Risiko Sosial

- **Peningkatan risiko kekurangan gizi (*wasting*)**
 - 36% responden berkurang konsumsi pangannya akibat hambatan finansial*
- **Pelayanan kesehatan esensial terkendala**
 - 55% posyandu menunda layanan imunisasi dan 46% menunda layanan antenatal ibu hamil.
- Penerapan PSBB dan **transformasi sistem pendidikan “Pembelajaran Jarak Jauh”** sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan dukungan teknologi untuk kualitas pembelajaran yang efektif.
 - Keterbatasan akses internet pada siswa/ mahasiswa di luar Pulau Jawa khususnya wilayah timur Indonesia.
 - Kualitas guru dan fasilitas sangat beragam.

*UNICEF, COVID-19 and Children in Indonesia: An Agenda for Action to Address Socio-Economic Challenges, 11 May 2020

** MoH & UNICEF, Rapid Health Assessment: Ensuring Sustainability of Essential Health Services for Children and Mothers During the COVID-19 Pandemic in Indonesia, July 2020

***Susenas, BPS 2020



Risiko Lingkungan

- **Peningkatan timbulan sampah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)**
 - Jumlah limbah medis dari Pandemi COVID-19 ini meningkat 30%, sedangkan kapasitas pengolahan limbah B3 medis di beberapa daerah terutama di luar Jawa masih terbatas*.
- **Peningkatan sampah plastik medis dan peralatan medis**
 - Limbah medis yang dihasilkan Indonesia per hari sebanyak 294,66 ton**
- **Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi** akibat berpindahnya pengguna transportasi umum
 - 88% angkutan umum perkotaan (MRT, LRT, TJ dan KRL) menurun dan 93% penumpang bus AKAP dan kereta api juga menurun***

*KLHK, Perkuat Regional untuk Respon Limbah Infeksius COVID-19, 18 May 2020

** Pusat penelitian Badan Keahlian DPR RI, Permasalahan limbah medis covid 19 di Indonesia, Vol. XII, No. 9/1/Puslit/Mei/2020

***Bappenas, Dampak COVID19 terhadap Pembangunan & Respon Pemerintah dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan, Webinar 28 Mei 2020

KEBIJAKAN PENGENDALIAN COVID-19 AKAN MEMPENGARUHI PENCAPAIAN TARGET PETA JALAN SDGS 2030



- **TPB/SDGs** menjadi **landasan** untuk mendesain ulang Transformasi Ekonomi.
- Arah transformasi ekonomi ke depan harus selaras dengan prinsip **green recovery dan green economy** yang inklusif dan berkelanjutan sesuai TPB/SDGs.
- **Pemerintah Daerah berperan penting** dalam upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mengembalikan atau bahkan mempercepat pencapaian target SDGs tahun 2030.

PENTINGNYA KOLABORASI MULTI PIHAK DALAM PENCAPAIAN SDGS

TPB/SDGs merupakan **target yang ambisius** dan hanya dapat dicapai melalui **KEMITRAAN**

 **DECADE OF ACTION**



1. Target, Kebijakan & Program
2. Data dan Indikator Pembangunan
3. Sosialisasi/Diseminasi, Komunikasi & Advokasi
4. Dukungan Regulasi & Anggaran
5. Monev & Pelaporan

**PEMERINTAH
DAN
PARLEMEN**

**AKADEMISI
DAN
PAKAR**

1. Peningkatan Kapasitas
2. Evaluasi
3. *Policy Paper/Policy Brief* sebagai dasar *Policy Formulation*
4. Data dan Indikator Pembangunan

**Platform
SDGs**

**FILANTROPI
DAN
BISNIS**

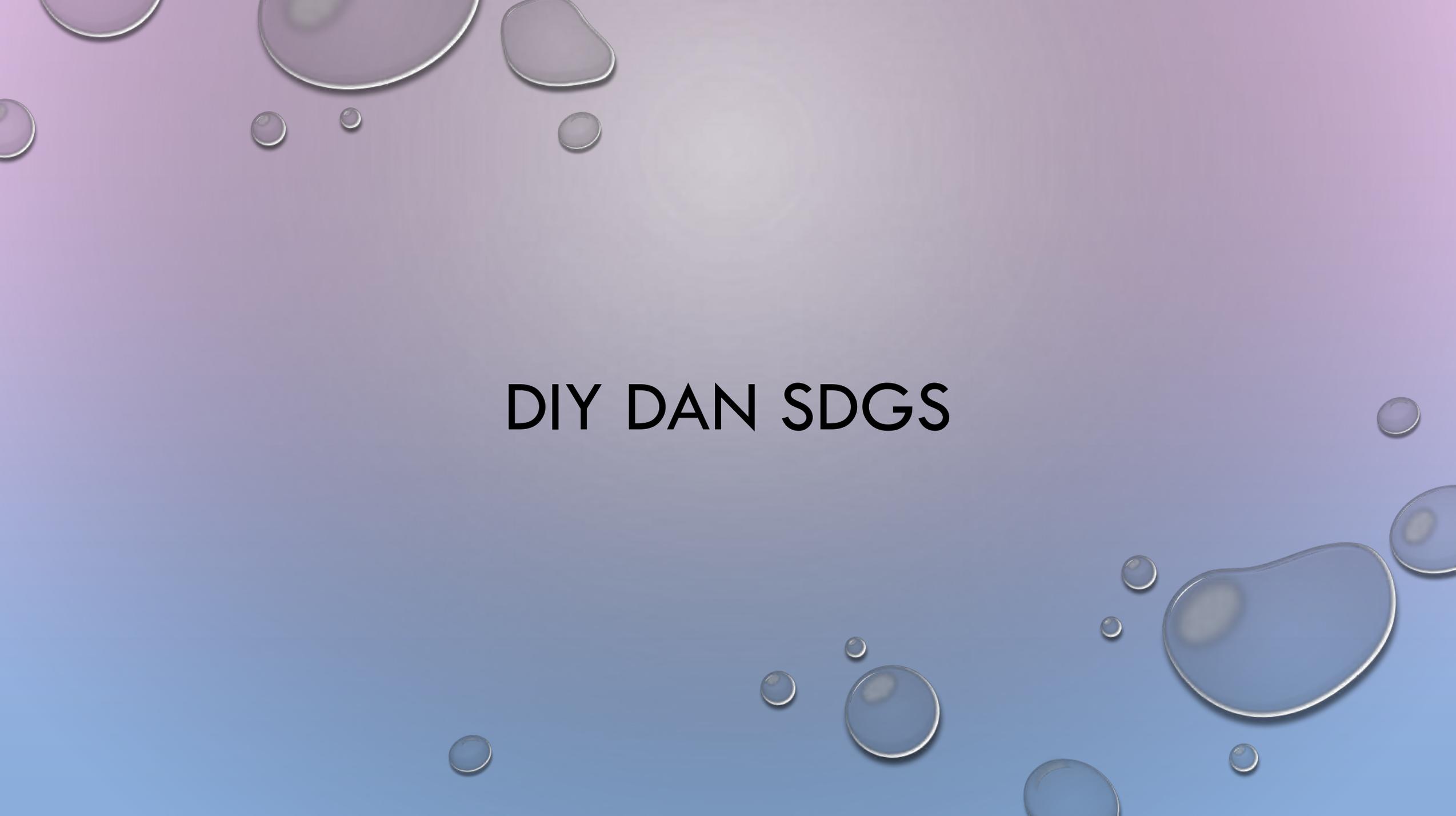
**ORMAS
DAN
MEDIA**

1. Advokasi Pelaku Usaha
2. Fasilitasi Program (Komunikasi, Peningkatan Kapasitas dan Kolaborasi Pendanaan)

1. Diseminasi dan Advokasi
2. Fasilitasi Program
3. Membangun pemahaman publik, dan Peningkatan Kapasitas
4. *Monitoring*



The imperative core principle of SDGs

The background features a vertical gradient from light purple at the top to light blue at the bottom. Scattered across the surface are numerous water droplets of various sizes, each with a realistic highlight and shadow, giving them a three-dimensional appearance.

DIY DAN SDGS

STATUS PERKEMBANGAN RAD SDGS

Periode RAD berakhir sebelum tahun 2021 dan belum ada RAD periode tahun berjalan

4 Provinsi

1. Riau
2. Lampung
3. Nusa Tenggara Timur
4. Sulawesi Selatan

Periode RAD berakhir tahun 2021 dan perlu menyusun RAD periode baru

9 Provinsi

1. Sumatera Barat
2. Jambi
3. Bengkulu
4. Kepulauan Riau
5. Kalimantan Tengah
6. Kalimantan Selatan
7. Kalimantan Utara
8. Sulawesi Utara
9. Sulawesi Tengah

Sudah menyampaikan RAD dua periode

4 Provinsi

1. Jawa Tengah
2. Jawa Timur
3. Bali
4. Kalimantan Timur

Dokumen RAD lengkap sesuai panduan (Pergub, Narasi, dan Lampiran Matriks)

10 Provinsi

1. Aceh
2. Sumatera Utara
3. Bengkulu
4. Lampung
5. DKI Jakarta
6. DI Yogyakarta
7. Bali
8. Kalimantan Barat
9. Kalimantan Utara
10. Kalimantan Timur

Pada tahun ini, sekitar **13 Provinsi** perlu menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs menggunakan Metadata Indikator Edisi II

Catatan:

RAD merupakan *Living Document*, Provinsi dengan RAD yang belum lengkap dapat dilengkapi sesuai panduan.

HASIL EVALUASI TPB DIY TAHUN 2018-2022

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SDGS DIY MENUNJUKKAN BEBERAPA CATATAN TERHADAP KONDISI PEMBANGUNAN DI DIY DIANTARANYA :

1. PERMASALAHAN KEMISKINAN
2. KETIMPANGAN PENDAPATAN,

RENCANA AKSI DAERAH

ACUAN PENYUSUNAN RAD TPB/SDGS

Pedoman Teknis



Metadana Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II

- Acuan untuk mengukur pencapaian TPB/SDGs Indonesia agar dapat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia serta keterbandingan antarprovinsi dan antarkabupaten/kota di Indonesia
- Untuk Pemerintah Daerah, Metadana Indikator Edisi II akan digunakan pada pemutakhiran RAD atau penyusunan RAD periode selanjutnya



Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs

- Acuan dalam penyusunan Renaksi TPB/SDGs: keterkaitan SDGs dengan kebijakan pembangunan, langkah teknis dan jadwal, sistematika, dan pengorganisasian.

Dokumen Yang Perlu Diperhatikan



Perpres
59/2017



RPJMD



RKPD



Renstra
OPD



Renja
OPD



Peta Jalan
SDGs 2030



Laporan
Pencapaian
SDGs
di Daerah



Dokumen
Kebijakan Terkait

- Dokumen Global
- RAN TPB/SDGs
- RAN/D GRK
- RAN/D API
- RENAS/RPBD
- RAN HAM
- STRANAS PPK
- RAN/D PG
- IBSAP



SISTEMATIKA RENAKSI TPB/SDGS



Bab I Pendahuluan

1. Keselarasan SDGs Terhadap Nawacita, RPJMN dan RPJMD
2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs
4. Pembiayaan TPB/SDGs
5. Metodologi Penyusunan Renaksi TPB/SDGs
6. Sistematika Renaksi TPB/SDGs

Bab II Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB/SDGs

(Analisis kondisi capaian dan tantangan 17 Goals)

Bab III Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs

(Arah kebijakan dan rencana capaian target (matriks 1) untuk 17 Goals)

Bab IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS
3. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Bab V Penutup

Lampiran

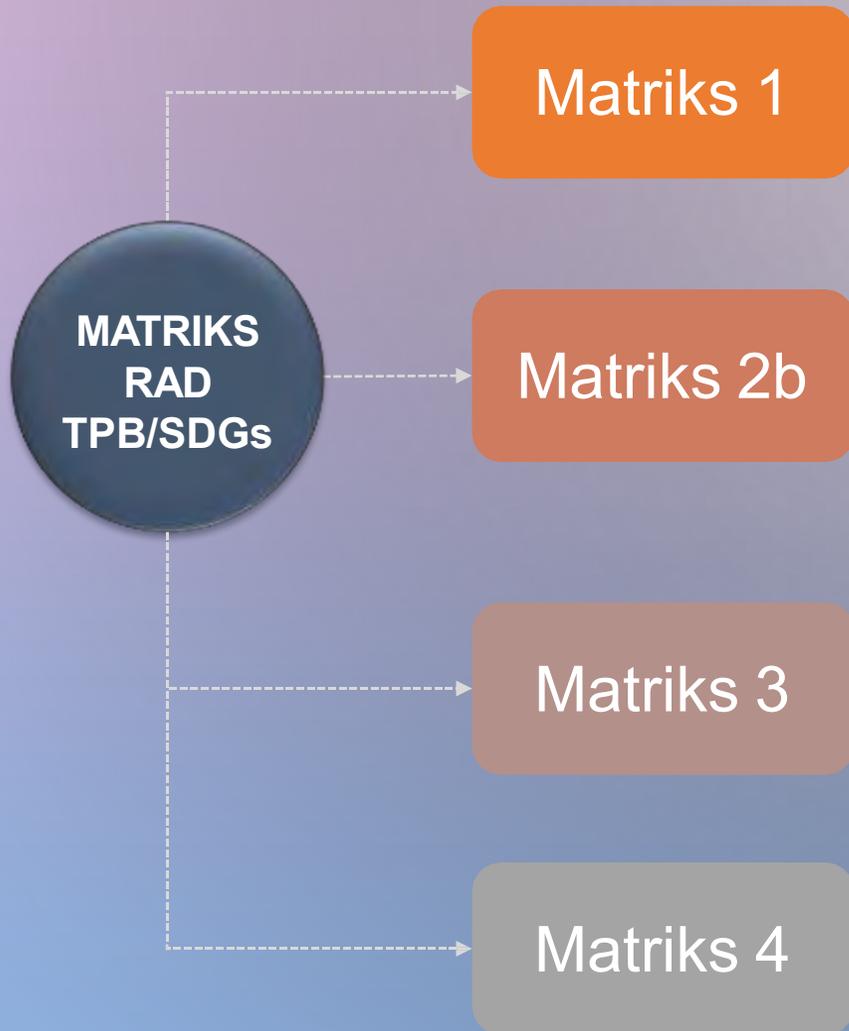
1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah (*Matriks 2a Pemerintah Pusat/2b Pemda*)
2. Matriks Program/Kegiatan Nonpemerintah (*Matriks 3 LSM, filantropi, academia, Matriks 4 pelaku usaha*)

LANGKAH TEKNIS PENYUSUNAN RENAKSI TPB/SDGS



Dalam proses penyusunan RAD SDGs, pemerintah provinsi selalu melibatkan pemerintah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, academia, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

MATRIKS RAD TPB/SDGS



Matriks 1: Rencana Capaian Provinsi Untuk Setiap Indikator SDGs (Tataran Dampak)

- Memuat indikator SDGs, sumber data, angka dasar (*baseline*), dan target pencapaian setiap tahun dari setiap indikator SDGs.
- Merupakan bagian dari Bab III Narasi RAD TPB/SDGs.

Matriks 2b: Rencana Program/Kegiatan Pemerintah Daerah

- Memuat kode dan nama program, kegiatan, subkegiatan, target tahunan, indikatif alokasi anggaran 5 tahun, sumber pendanaan, lokasi kegiatan, dan instansi pelaksana (OPD provinsi dan OPD kabupaten/kota).
- Merujuk pada Permendagri 90/2019 (terakhir direvisi dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021).
- Merupakan bagian dari Lampiran 1 RAD TPB/SDGs.

Matriks 3: Rencana Program/Kegiatan Nonpemerintah (Organisasi Kemasyarakatan/CSO/Organisasi Pemuda, Filantropi, Akademia)

- Memuat program, kegiatan, *output* kegiatan, target tahunan, indikatif alokasi anggaran, sumber pendanaan, lokasi kegiatan, dan lembaga pelaksana.
- Merupakan bagian dari Lampiran 2 RAD TPB/SDGs.

Matriks 4: Rencana Program/Kegiatan NonPemerintah (Pelaku Usaha)

- Memuat kode sesuai Lampiran POJK 51/2017, uraian kegiatan usaha berkelanjutan, program/kegiatan, indikator capaian, jangka waktu penerapan, target jangka panjang, target tahunan, alokasi pendanaan.
- Merupakan bagian dari Lampiran 2 RAD TPB/SDGs.

CATATAN PENTING RENAKSI TPB/SDGS

- Renaksi TPB/SDGs merupakan **living document yang dapat dimutakhirkan** berdasarkan hasil kaji ulang, penyesuaian dengan revisi RPJMD/Renstra OPD, melengkapi matriks kab/kota, atau mengakomodir tambahan program/ kegiatan dari organisasi nonpemerintah.
- Penggunaan **indikator yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota** dapat memperhatikan:
 - Metadata edisi II, untuk melihat indikator yang datanya diproduksi sampai di level provinsi dan kabupaten/kota.
 - Urusan kewenangan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - Disesuaikan dengan kondisi daerah misal tidak memiliki area lautan, maka indikator terkait kelautan tidak relevan
- **Penetapan target** pada dokumen RAD TPB/SDGs:
 - Mengacu pada target-target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra OPD, RKPD, Renja OPD, dokumen kebijakan terkait)
 - Melihat data historis kemudian dihitung proyeksinya (*business as usual* dan skenario intervensi). Kemudian penyepakatan target (keputusan di rapat pleno) serta didiskusikan dengan BPS Provinsi.
- **Sumber pendanaan** untuk pelaksanaan RAD TPB/SDGs:
 - APBD (provinsi dan kab/kota)
 - Program-program kementerian (Dekonsentrasi) maupun DAK.
 - Dukungan sumber pembiayaan dari nonpemerintah.
- **Pelibatan pemangku kepentingan nonpemerintah (NSA):**
 - Identifikasi aktor NSA kunci
 - Pertemuan untuk sosialisasi dan inventarisasi program/kegiatan
 - Koordinasi lebih lanjut untuk kolaborasi
 - Menumbuhkan “*trust*” atau saling percaya.
- **Sosialisasi RAD TPB/SDGs:**
 - Wajib dilakukan sehingga pihak-pihak terkait dapat mensinergikan program/kegiatan yang dapat mendukung SDGs.
 - Masyarakat memahami dan ikut berpartisipasi dalam berbagai upaya pelaksanaan SDGs.
 - Sosialisasi secara *offline* (pertemuan) atau *online* (*website*).

PERAN PERGURUAN TINGGI

Pendampingan Pemda Provinsi dan Kab/Kota Dalam Penyusunan RAD TPB/SDGs

- Peningkatan kapasitas mengenai indikator dan metadata SDGs
- Analisis isu-isu SDGs di daerah (*evidence-based analysis*) (dukungan data dan hasil studi/ penelitian yang pernah dilakukan)
- *Exercise* proyeksi target (berkoordinasi dengan BPS provinsi)
- Pendampingan dalam identifikasi program/kegiatan pemda
- Katalisator keterlibatan nonpemerintah dalam penyusunan RAD TPB/SDGs

Kontribusi dukungan kegiatan PT untuk SDGs pada Matriks 3 RAD TPB/SDGs

(mengisi matriks 3 dengan kegiatan terkait SDGs pada aspek pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat)

Masukan penyempurnaan untuk Draf RAD TPB/SDGs

- *Review* dan memberikan masukan terhadap draf RAD TPB/SDGs saat konsultasi publik dilakukan.



Sosialisasi dan Diseminasi RAD TPB/SDGs

- Advokasi ke masyarakat
- Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan

Kontribusi pada saat kaji ulang RAD TPB/SDGs

- Bagi daerah yang tengah melakukan kaji ulang/revisi RAD TPB/SDGs, PT dapat memberikan saran/masukan penyempurnaan.

The background features a vertical gradient from light purple at the top to light blue at the bottom. Scattered across the surface are numerous water droplets of various sizes, each with a realistic highlight and shadow, giving them a three-dimensional appearance.

BEST PRACTICE



BEST PRACTICES

TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN



Gerakan Sonjo Masyarakat DIY

Gotong royong masyarakat untuk kesehatan, ekonomi, dan pendidikan, melibatkan seluruh elemen masyarakat dan penyandang disabilitas.

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dayak melalui Lebah Madu Kelulut APP Sinar Mas

Pemberdayaan masyarakat desa dalam pengelolaan hutan lestari melalui agroforestri, praktik pertanian tanpa bakar yang mengaitkan kesejahteraan, kelestarian hutan, dan pengurangan kebakaran hutan

Pemberdayaan Ekonomi Melalui Pembinaan UKM Bagi Perempuan di Sekitar Wilayah Operasi Kangean Energy Indonesia Ltd

Pemberdayaan UKM (kelompok perempuan) untuk mampu memberikan nilai tambah pada hasil perikanan dan pertanian yang menghasilkan produk bernilai jual tinggi

Distribusi Sembako oleh Ojek Online Selama Pandemi di DKI Jakarta BNPB

Pendistribusian sembako dari berbagai pihak oleh BNPB dengan memberdayakan ojek online. Pengembangan aplikasi berbasis web untuk distribusi sembako secara *real time*.



Tujuan 1
Tanpa
Kemiskinan

Bantuan Kewirausahaan dan Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMMas) Rumah Zakat

Pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal dengan pendekatan individu (UMKM) perorangan (bantuan kewirausahaan) dan berbasis kelompok (*social enterprise*)

Program Kelingan COVID-19 di Kampung Enam, Tarakan, PT. Pertamina EP Tarakan Field

Pemberdayaan ibu-ibu penggiat pertanian sayur dan tanaman obat serta peningkatan kemandirian tanggap dan tangguh bencana (COVID-19).

Program Gerakan untuk Anak Sehat (Geunaseh) di Aceh UNICEF dan Flower Aceh

Skema perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka dan memastikan akses ke layanan kesehatan.

Cash-based Assistance in Lombok 2018–2020: From Earthquake to COVID-19 UNICEF Indonesia

Bantuan tunai untuk mendukung pemulihan ekonomi, memenuhi kebutuhan esensial rumah tangga, dan mengakses layanan dasar.

Filantropi Tanggap COVID-19 Filantropi Indonesia

Platform untuk merekam inisiatif filantropi, jumlah sumbangan, dan mempublikasikan laporan penggunaan dana sumbangan terkait COVID-19

PENAJAMAN FOKUS dan LOKUS

Konsistensi (Fokus) Penggunaan Data Untuk Penentuan Lokus dengan Modus dan Menu (program kegiatan) Sesuai Dengan Karakteristik Wilayah



Samigaluh,
Kokap,
Pengasih,
Sentolo

Imogiri

Prambanan,
Seyegan,
Tempel

Saptosari,
Playen,
Gedangsari,
Nglipar,
Ponjong,
Tepus,
Karangmojo



Lokus Kampung Berkah Melalui Program ZCD Kolaboratif

Kampung Berkah merupakan bagian dari program *Zakat Community development*, yaitu merupakan konsep penanggulangan kemiskinan yang telah dikenal sejak 1960 dan dianggap cukup efektif. Pemberdayaan dalam *community development* sejalan dengan misi zakat dalam penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah. Ditahun 2022 ini direncanakan dilaksanakan di 4 Kalurahan 4 Kapanewo 4 Kabupaten yang merupakan bagian dari 15 Lokus Kapanewon Kantong Kemiskinan. Kolaborasi : BAZNAS DIY, BAZDA KAB., ACT, DOMPET DHUAFA DAN TKPKD



1

PENGASIH

Kabupaten Kulon Progo - Sendangsari

2

Karangmojo

Kabupaten Gunungkidul - Bejiharjo

3

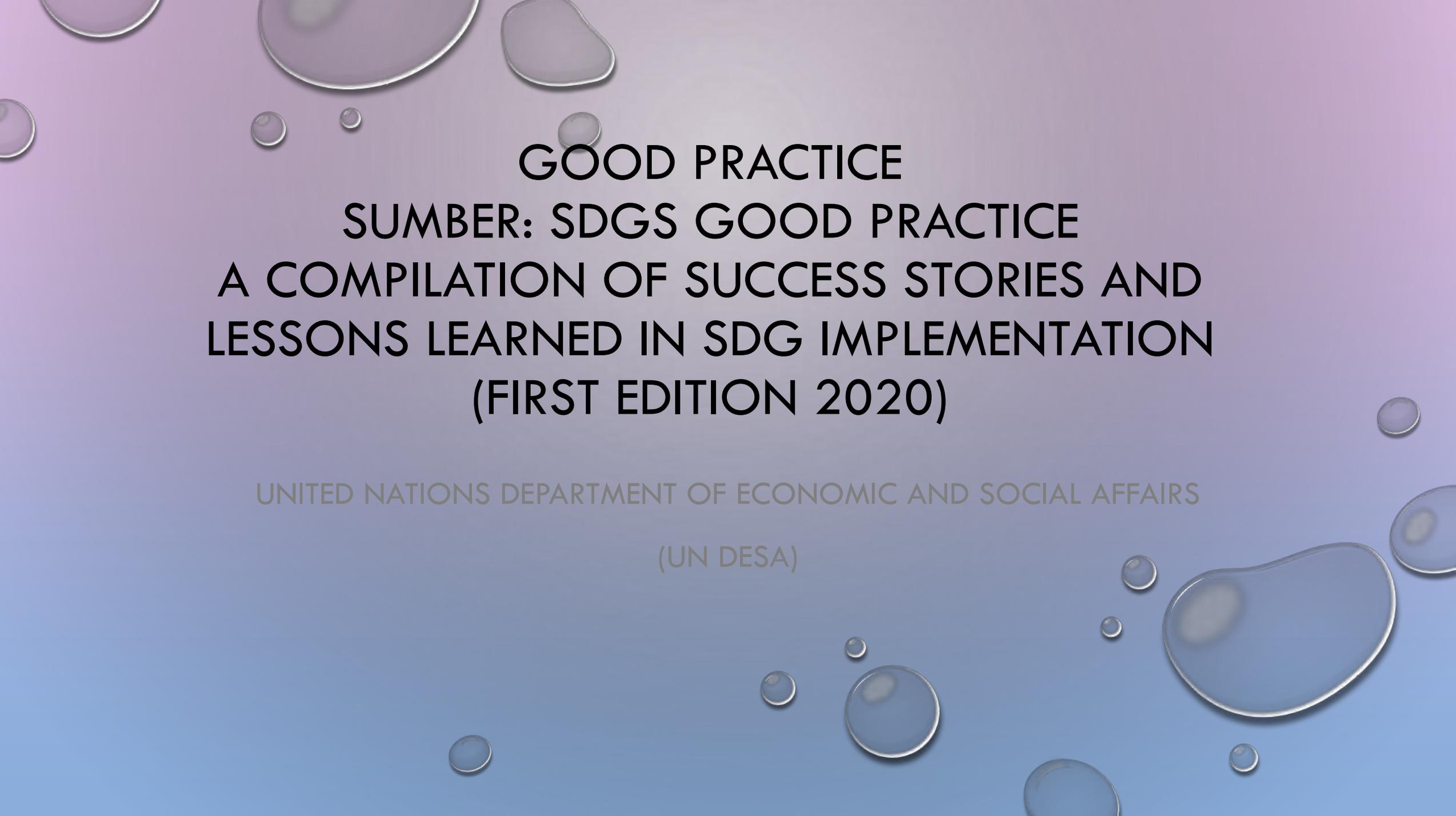
Imogiri

Kabupaten Bantul - Wukirsari

4

Prambanan

Kabupaten Sleman - Wukirharjo



GOOD PRACTICE
SUMBER: SDGS GOOD PRACTICE
A COMPILATION OF SUCCESS STORIES AND
LESSONS LEARNED IN SDG IMPLEMENTATION
(FIRST EDITION 2020)

UNITED NATIONS DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS

(UN DESA)

COMMUNITY-BASED ANIMAL HEALTH WORKERS (CAHWS) DI SUDAN AFRIKA

- LEBIH DARI SEPARUH POPULASI BERGANTUNG PADA TERNAK UNTUK BERTAHAN HIDUP,
- TETAPI BANYAK DAERAH TERPENCIL YANG TIDAK TERLAYANI OLEH DOKTER HEWAN PEMERINTAH ATAU SWASTA YANG BERKUALIFIKASI
- MELATIH PEKERJA KESEHATAN HEWAN BERBASIS MASYARAKAT (CAHW).
- CAHW TERLATIH INI MAMPU UNTUK MELAKUKAN BERBAGAI TUGAS KEDOKTERAN HEWAN DAN MEMPOPULERKAN METODE PETERNAKAN UNTUK MENGOPTIMALKAN PRODUKSI HEWAN, HEMAT BIAYA DAN RAMAH LINGKUNGAN.
- TERSEDIA AKSES KE PELAYANAN KESEHATAN HEWAN YANG BERKUALITAS.
- BERKONTRIBUSI: PERLINDUNGAN MATA PENCAHARIAN UTAMA, KETERSEDIAAN PANGAN BERBASIS HEWAN, , MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN, GIZI DAN PENDAPATAN MASYARAKAT RENTAN. SISTEM CAHW JUGA FOKUS PADA PENCIPTAAN KESADARAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZONOSIS PENYAKIT (ANTRAKS, BRUCELLOSIS, RABIES DLL) DAN NEGLECTED TROPICAL DISEASES (NTDS) LAINNYA.

FARMER MANAGED NATURAL REGENERATION (FMNR)

- REGENERASI ALAM YANG DIKELOLA PETANI (FMNR): MEMERANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN SECARA EFEKTIF DENGAN RESTORASI LAHAN DAN VEGETASI.
- (FMNR) ADALAH TEKNIK RESTORASI LAHAN BERBIAYA RENDAH YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMERANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN KHUSUSNYA PETANI SUBSISTEN MISKIN DENGAN MENINGKATKAN PRODUKSI PANGAN, KAYU DAN KETAHANAN TERHADAP IKLIM EKSTREM.
- DIMULAI PADA TAHUN 1983 DI NIGER, FMNR ADALAH BENTUK COPPING DAN POLLARDING,
- PETANI MELINDUNGI DAN MENGELOLA PERTUMBUHAN POHON DAN PERDU YANG BEREGENERASI SECARA ALAMI DI LAHANNYA DARI BATANG BAWAH ATAU DARI BENIH YANG DISEBARKAN MELALUI KOTORAN HEWAN.
- FMNR ADALAH CARA YANG MUDAH DAN MURAH BAGI PETANI UNTUK MENINGKATKAN JUMLAH POHON DI LAHAN PERTANIAN.

INTER-GENERATIONAL SELF-HELP CLUBS (ISHC) DI VIETNAM

- KELOMPOK SWADAYA ANTAR GENERASI: MEMPROMOSIKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YG
- INKLUSIF UNTUK MENSEJAHTERAKAN KELOMPOK TERTINGGAL DAN PALING RENTAN TERMASUK PEREMPUAN, LANJUT USIA, PENYANDANG DISABILITAS, ETNIS MINORITAS DAN ORANG MISKIN,
- MEMBERIKAN MANFAAT PADA MASYARAKAT SASARAN PADA BERBAGAI DIMENSI: SOSIAL, KESEHATAN, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
- MELALUI ISHC, MEREKA YANG KURANG BERUNTUNG SECARA EKONOMI MAMPU MENGHASILKAN PENDAPATAN, LEBIH PRODUKTIF, BERKELANJUTAN DAN RAMAH LINGKUNGAN, DIVERSIFIKASI SUMBER PENDAPATAN DAN MEMBANGUN FONDASI PRODUKTIVITAS.
- ISHC BERHASIL MENGURANGI KEMISKINAN, MENINGKATKAN KEMANDIRIAN FINANSIAL DAN SOSIAL, KESEHATAN DAN STABILITAS RUMAH TANGGA.
- ISHC JUGA MENYELENGGARAKAN LOKAKARYA BULANAN TENTANG POLA HIDUP SEHAT, MEMBERIKAN PELATIHAN DI TINGKAT MASYARAKAT TERHADAP KESEHATAN, PENGHIDUPAN, LINGKUNGAN, HAK ASASI MANUSIA, GENDER, PENUAAN DLL.

TERIMA KASIH



This Photo by Unknown Author is licensed under [CC BY](#)